

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN REALISASI APBD  
PROVINSI BANTEN PERIODE 2017-2023**

**Mujiyani<sup>1</sup>, Puan Novelina Safitri<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Akutansi, Universitas Gunadarma

**Article History**

Received : April 2025

Revised : April 2025

Accepted : Mei 2025

Published : Mei 2025

**Corresponding author\*:**

Mujiyani

**Contact:**

[Mujiyani0108@gmail.com](mailto:Mujiyani0108@gmail.com)

**Cite This Article:**

Mujiyani, M., & Safitri, P. N. (2025). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN REALISASI APBD PROVINSI BANTEN PERIODE 2017-2023. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 5(02), 12–17.

**DOI:**

<https://doi.org/10.56127/jaman.v5i02.2217>

**Abstract:** Banten Province for the 2017-2023 period and analyze the performance of local governments in financial management of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) and budget realization. This research is a quantitative descriptive research and secondary data source obtained and processed from the official website of the Directorate General of Financial Balance <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. The analysis methods of this study are the Effectiveness Ratio, Fiscal Decentralization Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Growth Ratio, and Expenditure Compatibility Ratio. The results of this analysis concluded that the Effectiveness Ratio was at the Effective level. Meanwhile, the Fiscal Decentralization Ratio is in the Very Good category. In addition, the Regional Financial Independence Ratio is classified as Delegative. Meanwhile, the Regional Financial Efficiency Ratio is in the Inefficient category. The Growth Ratio is in the positive category, although it has not reached the optimal level, for the Compatibility Ratio is in the Poor category, with an average operating expenditure of 60% while the average capital expenditure is 13%.

**Keywords:** Effectiveness Ratio, Fiscal Decentralization Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Regional Financial Efficiency Ratio, Growth Ratio, and Expenditure Compatibility Ratio.

**Abstrak:** Provinsi Banten Periode 2017-2023 dan menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan realisasi anggaran. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dan sumber data sekunder yang diperoleh dan diolah dari website resmi direktorat jendral perimbangan keuangan <https://djpk.kemenkeu.go.id/>. Metode analisis penelitian ini adalah Rasio Efektivitas, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Keserasian Belanja. Hasil analisis ini menyimpulkan bahwa Rasio Efektivitas berada tingkat Efektif. Sedangkan Rasio Desentralisasi Fiskal dalam kategori Sangat Baik. Selain itu, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tergolong dalam kategori Delegatif. Sementara Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berada dalam kategori Tidak Efisien. Adapun Rasio Pertumbuhan berada dalam kategori positif, meskipun belum mencapai tingkat yang optimal, untuk Rasio Keserasian berada dalam kategori Kurang Baik, dengan rata-rata belanja operasional sebesar 60% sedangkan rata-rata belanja modal sebesar 13%.

**Kata Kunci:** Rasio Efektivitas, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Keserasian Belanja.

**PENDAHULUAN**

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan yang sesuai dengan kondisi lokal. Salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah tercermin dalam kemampuan daerah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD menjadi instrumen penting dalam mencerminkan prioritas kebijakan dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Penilaian kinerja keuangan daerah dapat dilakukan melalui analisis rasio keuangan, meliputi rasio desentralisasi fiskal, efisiensi, kemandirian, efektivitas, pertumbuhan, dan keserasian.

Provinsi Banten memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional, khususnya melalui sektor industri. Didukung oleh infrastruktur yang memadai dan iklim investasi yang kondusif, Banten berpotensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, tantangan seperti tingginya upah

minimum dan biaya hidup di wilayah Tangerang dapat memengaruhi daya saing industri dan risiko relokasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dan Realisasi APBD Provinsi Banten Periode 2017–2023”.

### METODOLOGI PENELITIAN

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten selama 7 tahun yaitu dari tahun 2017-2023. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2023 yang sudah dipublikasikan untuk umum melalui situs resmi direktorat jendral perimbangan keuangan <https://djpk.kemenkeu.go.id/>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan yang direncanakan, lalu dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi asli daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio Efektivitas PAD dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 1. Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Rasio Efektivitas	Kriteria
2017	5.756,37	5.666,69	102%	Sangat Efektif
2018	6.329,14	6.183,87	102%	Sangat Efektif
2019	7.022	7.344,82	96%	Efektif
2020	5.906,54	8.154,75	72%	Kurang Efektif
2021	7.010,37	7.246,73	97%	Efektif
2022	8.203,10	7.793,65	105%	Sangat Efektif
2023	8.514,35	8.544,57	100%	Efektif

Rasio efektivitas PAD Provinsi Banten tahun 2017–2023 mengalami fluktuasi. Pada 2017 dan 2018 tercatat 102%. Tahun 2019 menurun menjadi 96%, lalu turun drastis pada 2020 menjadi 72% akibat penurunan realisasi PAD dan kenaikan anggaran. Tahun 2021 rasio meningkat menjadi 97% karena realisasi naik dan anggaran menurun. Pada 2022, rasio mencapai 105% dengan kenaikan realisasi dan anggaran. Tahun 2023, rasio menurun menjadi 100% meskipun realisasi dan anggaran sama-sama meningkat.

### Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio Desentralisasi Fiskal menunjukkan derajat Kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi juga kemampuan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi (Mahmudi, 2016). Rasio desentralisasi fiskal dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Rasio Desentralisasi Fiskal

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Rasio Desentralisasi	Kriteria
2017	5.756,37	9.706	59%	Sangat Baik
2018	6.329,14	10.320,37	61%	Sangat Baik
2019	7.022	11.202	63%	Sangat Baik
2020	5.906,54	10.334	57%	Sangat Baik
2021	7.010,37	11.623,31	60%	Sangat Baik
2022	8.203,10	11.205,65	73%	Sangat Baik
2023	8.514,35	11.576,54	74%	Sangat Baik

Rasio desentralisasi fiskal (RDF) Provinsi Banten menunjukkan tren fluktuatif selama 2017–2023. RDF meningkat dari 59% (2017) menjadi 63% (2019) seiring kenaikan PAD dan total pendapatan. Pada 2020 RDF menurun menjadi 57% akibat penurunan keduanya. Tahun 2021 RDF naik menjadi 60%, lalu melonjak menjadi 73% pada 2022 didorong kenaikan PAD dan penurunan total pendapatan. Pada 2023 RDF meningkat tipis menjadi 74% dengan naiknya PAD dan total pendapatan.

### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. RKKD dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian	Kriteria
2017	5.756,37	3.930,03	146%	Delegatif
2018	6.329,14	3.978,29	159%	Delegatif
2019	7.022	4.167,14	169%	Delegatif
2020	5.906,54	4.415,06	134%	Delegatif
2021	7.010,37	4.607,41	152%	Delegatif
2022	8.203,10	2.996,96	274%	Delegatif
2023	8.514,35	3.056,40	279%	Delegatif

RKKD Provinsi Banten mengalami fluktuasi sepanjang 2017–2023. RKKD meningkat dari 146% (2017) menjadi 169% (2019) seiring kenaikan PAD dan pendapatan transfer. Tahun 2020, RKKD turun menjadi 134% karena PAD menurun, meskipun transfer meningkat. Pada 2021 naik menjadi 152%, lalu melonjak tajam menjadi 274% pada 2022 akibat naiknya PAD dan turunnya transfer. Tahun 2023 RKKD kembali meningkat menjadi 279% didorong kenaikan kedua komponen tersebut.

### Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menunjukkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. REKD dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{REKD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Rasio Efisiensi	Kriteria
2017	9.512,81	9.706	98%	Kurang Efisien
2018	9.992,82	10.320,37	97%	Kurang Efisien
2019	11.324,59	11.202	101%	Tidak Efisien
2020	9.879,31	10.334	96%	Kurang Efisien
2021	11.660,63	11.623,31	100%	Tidak Efisien
2022	11.278,68	11.205,65	101%	Tidak Efisien
2023	11.814,13	11.576,54	102%	Tidak Efisien

Rasio efisiensi Provinsi Banten menunjukkan pola fluktuatif selama periode 2017–2023. Pada 2017, rasio efisiensi sebesar 98%, kemudian menurun menjadi 97% pada 2018. Tahun 2019 meningkat menjadi 101% seiring kenaikan belanja dan pendapatan. Pada 2020, rasio menurun menjadi 96% akibat penurunan keduanya. Tahun 2021 rasio kembali naik menjadi 100%, lalu meningkat menjadi 101% pada 2022, meskipun belanja dan pendapatan menurun. Pada 2023, rasio efisiensi mencapai 102% didorong oleh peningkatan total belanja dan pendapatan.

### Rasio Pertumbuhan

Rasio Pertumbuhan digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio Pertumbuhan dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan Tahun } t - \text{Pendapatan Tahun } t-1}{\text{Pendapatan Tahun } t-1} \times 100\%$$

Tabel 5. Rasio Pertumbuhan

Tahun	Pendapatan Tahun t	Pendapatan Tahun (t-1)	Rasio Pertumbuhan
2017	9.706	8.005,29	21%
2018	10.320,37	9.706	6%
2019	11.202	10.320,37	9%
2020	10.334	11.202	-8%
2021	11.623,31	10.334	12%
2022	11.205,65	11.623,31	-4%
2023	11.576,54	11.205,65	3%

Rasio pertumbuhan pendapatan Provinsi Banten berfluktuasi selama 2017–2023. Tahun 2017 tercatat pertumbuhan sebesar 21%, kemudian menurun menjadi 6% pada 2018. Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 9%, namun turun drastis menjadi -8% pada 2020. Pada 2021, rasio tumbuh signifikan menjadi 12%, lalu kembali menurun menjadi -4% pada 2022. Tahun 2023 mengalami pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 3%.

### Rasio Keserasian

Rasio Keserasian merupakan rasio yang mendeskripsikan aktivitas pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja investasi yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil. Terdapat dua perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal (Halim, 2012). Terdapat dua perhitungan dalam rasio keserasian ini, yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal.

#### Rasio Belanja Operasional:

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Berikut ini merupakan rumus rasio belanja operasional.

$$\text{Rasio Keserasian Belanja Operasional} = \frac{\text{Total Belanja Operasional}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 6. Rasio Keserasian Belanja Operasional

Tahun	Total Belanja Operasional	Total Belanja Daerah	Presentase
2017	5.516,25	9.512,81	58%
2018	5.946,40	9.992,82	60%
2019	6.969,43	11.324,59	62%
2020	6.470,88	9.879,31	65%
2021	6.923,42	11.660,63	59%
2022	6.391,43	11.278,68	57%
2023	6.752,12	11.814,13	57%
Rata-rata	6.424,28	10.780,42	60%

Berdasarkan data yang disajikan, total belanja operasional menunjukkan tren fluktuatif dalam periode 2017 hingga 2023. Nilai tertinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar Rp. 6.923,42. Sementara itu, nilai terendah tercatat pada tahun 2017 dengan jumlah Rp. 5.516,25. Jika dibandingkan dengan total belanja daerah, persentase belanja operasional terhadap total belanja daerah berkisar antara 57% hingga 65%. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan rasio sebesar 65%, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2022 dan 2023 dengan rasio sebesar 57%. Rata-rata persentase belanja operasional terhadap

total belanja daerah selama periode ini adalah 60%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah dialokasikan untuk belanja operasional.

### Rasio Belanja Modal

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah. Berikut ini merupakan rumus rasio belanja modal.

$$\text{Rasio Keserasian Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 7. Rasio Keserasian Belanja Modal

Tahun	Total Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Persentase
2017	1.349,69	9.512,81	14%
2018	1.362,55	9.992,82	14%
2019	1.379,32	11.324,59	12%
2020	994,26	9.879,31	10%
2021	1.297,23	11.660,63	11%
2022	1.660,22	11.278,68	15%
2023	1.523,81	11.814,13	13%
Rata-rata	1.367,42	10.780,13	13%

Berdasarkan perhitungan di atas, total belanja modal mengalami fluktuasi dalam rentang waktu 2017 hingga 2023. Pada tahun 2020, belanja modal mengalami penurunan signifikan menjadi Rp. 994,26 yang merupakan nilai terendah dalam periode yang diamati. Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan drastis hingga mencapai Rp. 1.660,22 yang merupakan nilai tertinggi dalam rentang waktu tersebut. Secara keseluruhan, tren belanja modal menunjukkan adanya fluktuasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta kondisi ekonomi pada masing-masing tahun. Kenaikan signifikan pada tahun 2022 dapat mengindikasikan adanya kebijakan stimulus atau peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur dan aset tetap. Sebaliknya, penurunan pada tahun 2020 dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan realokasi anggaran untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti kesehatan dan bantuan sosial.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang kinerja keuangan daerah Provinsi Banten tahun 2017-2023, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Rasio Efektivitas, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2023 yaitu berada pada kriteria Efektif dengan rata-rata rasio sebesar 96%.
2. Berdasarkan Rasio Desentralisasi Fiskal, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2023 yaitu berada dalam kriteria Sangat Baik dengan rata-rata rasio sebesar 64%.
3. Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2023 yaitu berada dalam kriteria Delegatif dengan rata-rata rasio sebesar 187%.
4. Berdasarkan Rasio Efisiensi, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2023 yaitu berada dalam kriteria Tidak Efisien dengan rata-rata rasio sebesar 99%.
5. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan, persentase pertumbuhan Provinsi Banten tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 21% dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -8%. Namun, rata-rata pertumbuhan Provinsi Banten pada tahun 2017-2023 sebesar 6% yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah di Provinsi Banten mengalami pertumbuhan yang positif.
6. Berdasarkan Rasio Keserasian, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2017-2023 yaitu berada dalam kriteria Kurang Baik, dengan rata-rata belanja operasional sebesar 60% sedangkan rata-rata belanja modal sebesar 13%. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah lebih banyak menggunakan anggaran belanjanya untuk keperluan belanja operasional.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran mengenai penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Banten

Pemerintah Daerah Provinsi Banten diharapkan dapat meningkatkan dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan maupun lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun, di sisi lain masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan pajak di Provinsi Banten, salah satunya adalah tunggakan pajak kendaraan dinas oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak, termasuk penerapan sanksi yang lebih tegas serta optimalisasi sistem pengawasan dan transparansi dalam administrasi perpajakan daerah. Diharapkan juga untuk menurunkan belanja daerah dan meningkatkan pendapatan daerahnya, agar tingkat efisiensi pada Provinsi Banten meningkat.

2. Bagi peneliti

selanjutnya Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan periode tahun penelitian atau dapat melanjutkan untuk periode tahun berikutnya, mengingat penelitian ini terbatas pada tahun 2017-2023. Selain itu, disarankan pula untuk memperluas lingkup penelitian dengan mengambil objek di daerah lain, sehingga hasil penelitian dapat mencerminkan kondisi yang lebih beragam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Amalia, H. R., & Pratiwi, B. Y. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2018–2020. *Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 73–81.
- [2] Budiharjo, R., & Maretta, S. (2023). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas. *Journal of Economics and Management*, 106–113.
- [3] Dali, N., Akib, M., & Haisa, W. (2021). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Muna. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 319–336.
- [4] Fahmi, I. (2014). Analisis kinerja keuangan. Bandung: Alfabeta.
- [5] Fathah, R. N. (2017). Analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada pemerintah daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 33–48.
- [6] Fitria, H. (2019). Analisis neraca dan laporan realisasi anggaran pemerintah daerah. Malang: CV IRHD.
- [7] Halim, A. (2012). Teori, konsep dan aplikasi. Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Halim, A., & Kusufi, M. A. (2014). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- [9] Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Edisi ketiga). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [10] Mahmudi. (2019). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [11] Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
- [12] Mardiasmo. (2021). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
- [13] Mashun, M. (2009). Pengukuran kinerja sektor publik. Yogyakarta: BPFE.
- [14] Nasution, D. A. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 149–162.
- [15] Nusa, Y., & Panggalo, L. (2022). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Papua periode 2014–2021. *Jurnal Financial and Tax*, 147–148.7.